

Dampak Skema Relasi Kopi Sebagai Pengembangan Perekonomian Petani Kopi di Pedesaan

✉ Syapta Wiguna, Syafruddin Karimi, Endrizal Ridwan
Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas, Indonesia

Received: February 2019; Accepted: April 2019; Published: April 2019

DOI: <http://doi.org/10.21107/agriekonomika.v8i1.5027>

ABSTRACT

Perkembangan segmentasi permintaan kopi melalui relasi kopi membuat petani kopi memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan perbaikan penghidupan. Relasi kopi menyederhanakan rantai distribusi kopi sehingga petani kopi memperoleh peluang pendapatan dan pengembangan kapasitas yang lebih baik. Relasi kopi juga mendorong terbentuknya perantara yang bisa memenuhi kualitas kopi yang sesuai dengan permintaan pasar. Perantara tersebut diantaranya bisa berupa organisasi petani seperti koperasi. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan melibatkan pelaku ekonomi kopi diantaranya, petani dan pengelola koperasi. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa skema relasi kopi mampu meningkatkan perekonomian petani kopi dan memberikan nilai tambah yang lebih tinggi. Selain itu, petani kopi mampu meningkatkan kapasitas yang dibutuhkannya untuk dapat menghasilkan kopi berkualitas sesuai dengan permintaan pasar. Hal yang perlu dibenahi dalam implementasi model relasi kopi adalah pengelolaan dan penguatan organisasi petani kopi.

Kata Kunci: Relasi Kopi, Pembangunan Pedesaan, Koperasi

The Impact of the Relationship Coffee Scheme As Development of Rural Coffee Farmers' Economies

ABSTRACT

The development of the demand segmentation of coffee through relationship coffee scheme makes coffee farmers have a great opportunity to get livelihood improvements. Relationship coffee simplifies the coffee distribution chain so that coffee farmers get better income opportunities and capacity development. Relationship coffee also encourage the formation of intermediaries that can meet the quality of coffee in accordance with market demand. Among these intermediaries can be farmers' organizations such as cooperatives. The research method uses qualitative methods by involving coffee actors including farmers and cooperative managers. The results of the identification show that the relationship coffee scheme is able to improve the economy of coffee farmers and provide higher added value. In addition, coffee farmers are able to increase the capacity they need to be able to produce quality coffee according to market demand. What needs to be addressed in the implementation of the coffee relations model is the management and strengthening of coffee farmer organizations.

Keyword: Relationship Coffee, Rural Development, Cooperatives

Cite this as:

Wiguna, S., Karimi, S., Ridwan, E. (2019). Dampak Skema Relasi Kopi Sebagai Pengembangan Perekonomian Petani Kopi di Pedesaan. *Agriekonomika*, 8(1). 93-103. <http://doi.org/10.21107/agriekonomika.v8i1.5027>

✉ Corresponding author :

Address : Limau Manis, Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat 25175

Email : syapta@gmail.com

Phone :

© 2019 Universitas Trunojoyo Madura
p-ISSN 2301-9948 | e-ISSN 2407-6260

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi utama di pasar dunia bersama Brazil, Vietnam dan Kolombia. Kapasitas produksi biji kopi tahun 2017 mencapai 0,67 juta ton dengan nilai lebih dari 12 triliun rupiah (FAO, 2019). Tingginya nilai ekonomi kopi tersebut membuat banyak petani mengandalkan kopi sebagai sumber penghidupan. Hal tersebut ditandai dengan dominannya keberadaan perkebunan rakyat dibandingkan perkebunan swasta dan perkebunan negara. Pada tahun 2017, luas perkebunan rakyat berkontribusi sebesar 96,1% terhadap luas total perkebunan kopi di Indonesia, dan kontribusi produksi kopi sebesar 94,1% terhadap total produksi kopi Indonesia (Kementerian Pertanian, 2017). Tercatat sebanyak lebih kurang 1,79 juta keluarga merupakan petani kopi yang tinggal di pedesaan dengan kepemilikan lahan rata-rata hanya 0,6 hektare.

Kesejahteraan perekonomian petani kopi merupakan isu yang terus menjadi perhatian dalam beberapa dekade terakhir. Volatilitas harga kopi dianggap berpengaruh buruk terhadap perekonomian petani kopi yang umumnya tinggal di kawasan pedesaan pada negara berkembang (Wahyudi & Jati, 2012). Volatilitas harga kopi memberikan sinyal ketidakpastian harga kopi, sehingga menghalangi petani kopi dalam memperbaiki penghidupannya. Lewin dkk. (2004), pernah melaporkan bahwa dalam jangka panjang keuntungan yang diperoleh petani kopi mengalami penurunan yang drastis sampai menjadi hanya 5% dari total nilai kopi akibat dari ketidakpastian harga. Kenyataan tersebut kemudian dipertegas oleh Pratiwi (2015), yang menyatakan bahwa ketidakpastian harga membuat keuntungan yang diperoleh petani kopi tidak lebih dari 10%. Rendahnya keuntungan penjualan kopi membuat rumah tangga petani kopi terkendala dalam membuat keputusan yang tepat dalam merencanakan dan mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya (Borrella, et al. 2015). Hal itu semakin memperburuk produktivitas tanaman kopi dan berujung

kepada semakin menurunnya pendapatan rumah tangga petani kopi.

Lebih lanjut, Perez dkk. (2017), mengemukakan bahwa ketergantungan rumah tangga petani terhadap harga kopi sebagai variabel kunci keuntungan pertanian disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah: (i) petani cenderung merasa bahwa mereka dalam kondisi produksi optimum, dan tidak melakukan upaya lain untuk meningkatkan pendapatan; (ii) petani menganggap bahwa apabila terjadi lonjakan harga akan bisa mereka manfaatkan untuk membiayai peningkatan teknis produksi dan input jika memungkinkan; dan (iii) petani tersebut memang pada dasarnya tidak peduli dengan biaya produksi dan produktivitas hasil pertanian. Dengan demikian, harga kopi merupakan instrumen yang sangat penting bagi keberlanjutan produksi kopi dan kemaslahatan perekonomian rumah tangga petani kopi.

Ketidakpastian harga kopi sebenarnya juga telah menjadi perhatian serius bagi negara-negara konsumen kopi. Untuk menjaga stabilitas pasokan kopi dari negara produsen kopi maka perlu diberikan insentif terhadap harga kopi. Skema stabilisasi tersebut pernah dilakukan pada tahun 1962 melalui kebijakan kuota ekspor kopi yang diatur dalam kerangka kerja *International Coffee Agreement* (ICA). Kebijakan skema stabilisasi harga melalui ICA diyakini berhasil meningkatkan dan mengendalikan harga kopi dunia (Daviron & Ponte, 2005a). Meskipun demikian, Banyak permasalahan yang muncul akibat pemberlakuan jatah ekspor kopi tersebut, baik dari negara produsen maupun negara konsumen. Permasalahan utama bagi negara produsen adalah kehilangan penerimaan potensial WIPO (2017), terutama produsen kopi utama seperti Brazil, Kolombia, dan Indonesia. Selain itu, sistem kuota memberikan sinyal yang tidak tepat terkait dengan permintaan pasar kopi global, sehingga petani sering merugi. Akibatnya, rezim perdagangan ICA terpaksa berhenti dan ditangguhkan pada tahun 1989.

Penanggulangan rezim ICA mendorong berkembangnya kebijakan liberalisasi kopi. Liberalisasi kopi merupakan deregulasi pemasaran kopi yang membuat swasta memiliki kontrol yang besar terhadap sistem pemasaran kopi dan peran pemerintah semakin berkurang (Russell dkk., 2012). Liberalisasi kopi memberikan dorongan kepada negara produsen kopi untuk melakukan diferensiasi produk kopi berdasarkan kualitas. Perkembangan segmentasi permintaan kopi membuat kopi lebih mudah diklasifikasikan dan dikenal berdasarkan kualitasnya (Ponte & Gibbon, 2005). Selanjutnya, menurut Russell dkk. (2012), liberalisasi merupakan bagian dari komitmen produsen untuk menyediakan kopi berkualitas premium sehingga bisa mendapatkan insentif harga riil kopi yang tinggi. Akan tetapi, meskipun kualitas sangat penting namun mewujudkannya merupakan hal yang sulit bagi banyak negara produsen (Daviron & Ponte, 2005b). Itulah sebabnya beberapa negara produsen dengan produksi tinggi tidak begitu memperhatikan aspek kualitas karena tidak begitu berpengaruh terhadap pangsa pasar mereka. Berkaitan dengan itu, Neilson (2007), menyatakan bahwa ada dua strategi yang dilakukan oleh produsen kopi supaya tetap kompetitif pada pasar global, yaitu sebagai produsen berbiaya rendah dengan produksi kopi massal; atau melakukan diferensiasi produk yang menasar segmen pasar kopi berkualitas.

Diferensiasi produksi kopi berkembang melalui berbagai skema intervensi terhadap produsen kopi. Skema intervensi secara umum bertujuan untuk mewujudkan perbaikan terhadap kualitas kopi yang dihasilkan dan juga penghidupan petaninya (Lewin dkk., 2004). Pada prinsipnya diasumsikan bahwa skema tersebut bisa menyederhanakan rantai nilai kopi dan mengurangi biaya transaksi sehingga memperbaiki pendapatan petani. Selain itu, intervensi dilakukan untuk memastikan keberlanjutan terhadap petani kopi sehingga bisa menjamin pasokan kopi berkualitas (Perez dkk., 2017). Skema intervensi yang populer dalam pasar kopi

global adalah sertifikasi sustainabilitas. Petani kopi yang tergabung dalam skema ini diharuskan untuk memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh penyelenggara sertifikasi.

Dampak skema sertifikasi sustainabilitas terhadap petani kopi masih menjadi perdebatan. Hal yang menjadi isu utamanya adalah kemangkusannya dalam memperbaiki perekonomian petani kopi. Secara umum Glasbergen (2018), menyatakan bahwa skema sertifikasi sejauh ini memang mampu membuat produksi pertanian lebih berkelanjutan namun belum bisa mewujudkan perubahan sistemik yaitu kesejahteraan petani.

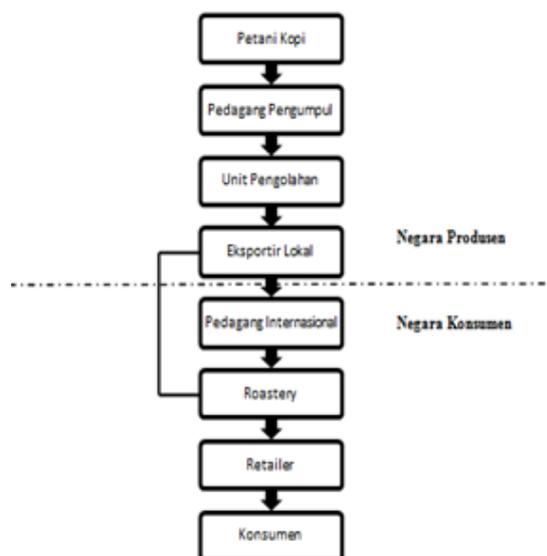
Beberapa waktu terakhir berkembang segmentasi pasar kopi yang menasar kawasan domestik, Asia, dan Timur Tengah. Segmentasi pasar kopi tersebut lebih mengutamakan kopi berkualitas daripada bersertifikasi (Astuti dkk., 2015). Segmentasi pasar tersebut juga merupakan pergeseran permintaan kopi dari *second wave* yang berorientasi diferensiasi produk menjadi *third wave* yang berorientasi relasi kopi langsung (WIPO, 2017). Melalui skema relasi kopi, *roastery* kopi melakukan pembelian kopi berkualitas secara langsung kepada petani kopi berdasarkan identitas perkebunan (*origin*) sehingga memperpendek rantai nilai kopi. Sederhananya, relasi kopi merupakan skema harga premium terhadap kopi berkualitas melalui kerjasama langsung antara *roastery* dengan petani kopi. Kerjasama tersebut menurut Vicol dkk. (2018), melibatkan banyak aspek, diantaranya adalah: hubungan personal, kepercayaan, transparansi harga, komitmen terhadap perbaikan kualitas, dan yang lebih utama adalah itikad untuk memperbaiki penghidupan petani kopi dan komunitasnya.

Skema relasi kopi tidak hanya melibatkan kerjasama antara petani dengan *roastery* dari negara konsumen, namun juga dari negara produsen. Peran serta *roastery* domestik merupakan dampak dari pertumbuhan kesadaran masyarakat terhadap konsumsi kopi lokal yang

berkualitas. Fenomena tersebut oleh Glick (2017), disebut sebagai *fourth wave*. Menurutnya, *fourth wave* merupakan transformasi dari *third wave* yang berkembang di negara produsen kopi, termasuk Indonesia. Transformasi tersebut utamanya disebabkan oleh perbaikan pendapatan masyarakat kelas menengah sehingga menggeser selera mereka cenderung terhadap produk pertanian lokal berkualitas, termasuk kopi.

Kemunculan *fourth wave* memberikan harapan perbaikan terhadap kehidupan petani kopi. Hal yang mendasarinya adalah, nilai pendapatan paling besar sepanjang rantai nilai adalah yang semakin dekat dengan dimana kopi tersebut dikonsumsi (WIPO, 2017). Dalam skema relasi kopi, rantai nilai kopi semakin sederhana dengan hanya melibatkan sedikit aktor sepanjang rantai. Dengan demikian, skema relasi kopi pada *fourth wave* memberikan peluang pembagian keuntungan bisa terdistribusi secara lebih menjanjikan terhadap petani kopi.

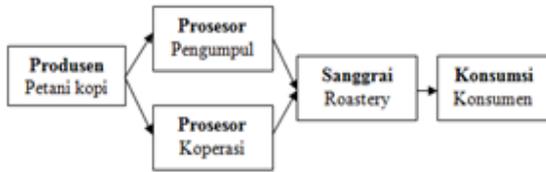
Konsep relasi kopi sebenarnya sudah sejak tahun 1950an dalam industri kopi. Pemikiran tersebut muncul untuk menyederhanakan rantai pasok kopi dengan mengeliminasi peran pengumpul yang dianggap mengeksploitasi harga tingkat petani sehingga jadi rendah (Rosenberg dkk., 2018). Struktur distribusi pemasaran kopi sangat menentukan pendapatan dari penjualan kopi yang diterima oleh petani. Semakin panjang struktur distribusi maka akan semakin kecil pendapatan yang diterima oleh petani kopi. Oleh karena itu, perlu adanya penerapan skema perdagangan yang menyederhanakan rantai perdagangan kopi, diantaranya dengan melakukan pengembangan rantai nilai kopi, diantaranya skema relasi kopi (perbandingan skema perdagangan kopi konvensional dengan skema relasi kopi, lihat Gambar 1 dan Gambar 2).



Gambar 1
Rantai Perdagangan Kopi
Konvensional

Sumber: Milford, (2004)

Skema relasi kopi secara mendasar sangat berbeda dengan konsep skema sertifikasi terkait formalitasnya. Umumnya tidak ada evaluasi kriteria kualitas kopi secara resmi dari pihak ketiga pada relasi kopi, biasanya justru hanya memanfaatkan jasa Q grader (penguji citarasa kopi yang telah bersertifikasi). Selanjutnya, meskipun konsepnya terkesan mengesampingkan peran perantara dalam struktur rantai nilai, namun menurut Holland dkk. (2015), model relasi kopi bukan berarti menyingkirkan peranan aktor perantara yang telah berpengalaman dalam perdagangan kopi. Kerjasama dengan setiap rumah tangga petani kopi pada kenyataannya membutuhkan biaya transaksi yang lebih besar (Vicol dkk., 2018). Oleh karena itu, kerja sama tersebut akan lebih menguntungkan melalui perantara sebagai prosesor kopi. Idealnya, prosesor tersebut berbentuk organisasi petani seperti koperasi maupun kelompok tani. Menurut pendapat Ibnu dkk. (2018), petani yang terorganisir akan memiliki peluang memperoleh keuntungan yang lebih tinggi daripada yang tidak.



Gambar 2
Rantai Distribusi Pemasaran Kopi pada
Skema Relasi Kopi

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Pemerintah Indonesia sejauh ini juga berupaya memanfaatkan relasi kopi sebagai strategi pembangunan pedesaan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat petani kopi (Vicol dkk., 2018). Intervensi pemerintah dianggap sangat penting. Pertimbangannya adalah karena petani kopi sebagaimana pertanian lainnya merupakan sektor yang rentan dan kaku terhadap berbagai perubahan (Mann, 2018). Dengan kata lain, rumah tangga petani memiliki respons yang lambat dalam mengantisipasi perubahan segmentasi permintaan dan agribisnis, sehingga mereka hanya memperoleh keuntungan yang lebih sedikit dan bahkan berkurang. Intervensi pemerintah biasanya ditransmisikan melalui organisasi petani yang berperan sebagai wadah untuk menyalurkan bantuan berupa sarana produksi, mesin, dan pelatihan kepada petani kopi. Melalui kebijakan tersebut diharapkan ada perbaikan terhadap daya saing petani kopi sehingga bisa mengakses pasar kopi berkualitas premium. Dengan demikian, peranan organisasi petani dianggap menjadi sangat penting sebagai agen pembangunan pedesaan dan memastikan keberlanjutan perekonomian petani kopi. Menurut Bray & Neilson (2017), keberadaan organisasi petani yang kuat akan menciptakan kemaslahatan bagi setiap rumah tangga petani kopi.

Berbeda dengan skema perdagangan kopi lainnya yang berorientasi pada diferensiasi (kopi dibedakan berdasarkan nilai kualitas atau *grade*), model relasi kopi justru berdasarkan eksperimental. Artinya, relasi kopi mendorong inovasi melalui pengembangan

kualitas inherent kopi yang sesuai dengan selera konsumen. Dengan demikian, model relasi kopi melibatkan peranan petani kopi secara optimal dalam meningkatkan kualitas kopi sehingga mereka berpeluang mengembangkan kapasitasnya sesuai dengan dinamika pasar kopi premium.

Model relasi kopi menurut Vicol dkk. (2018), memiliki potensi untuk meningkatkan kapasitas petani kopi melalui transfer teknologi, gagasan, pengetahuan, pembiayaan, dan infrastruktur penunjang lainnya. Setiap petani secara tidak langsung mendapatkan pelatihan untuk perbaikan kualitas kopi sehingga mereka mendapatkan harga penjualan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, relasi kopi turut memfasilitasi pengembangan produk bagi organisasi petani sebagai prosesor kopi, dan juga setiap petani sebagai pemasok kopi. Pengembangan produksi tersebut umumnya ditandai dengan peningkatan produktivitas dan perbaikan kualitas kopi. Dengan demikian, model relasi kopi secara inherent mampu menciptakan nilai tambah bagi petani kopi.

Petani umumnya mengapresiasi model relasi kopi karena memudahkan menjual kopi dalam bentuk gelondongan karena bisa menghemat waktu dan tenaga dibandingkan mengolahnya sendiri. Berkenaan dengan hal tersebut, Vicol dkk. (2018), mengidentifikasi lima dampak potensial dari manfaat relasi kopi bagi petani kopi, yaitu: (i) pembayaran bagi hasil keuntungan dari keanggotaan sebagai koperasi petani; (ii) harga kopi lebih menjanjikan akibat kenaikan harga tingkat petani berdasarkan kualitas spesialti; (iii) menghemat biaya tenaga kerja karena pola penjualan kopi berupa gelondongan matang; (iv) meningkatkan akses terhadap keterampilan, pengetahuan, bantuan teknis dan keuangan; (v) peluang terciptanya lapangan pekerjaan non-pertanian pada kegiatan pengolahan unit pengolahan hasil (UPH) kopi.

Menurut Borrella dkk. (2015), model relasi kopi secara umum mampu mewujudkan tiga strategi pengembangan, yaitu: *Pertama*, menanggulangi kebutuhan

petani kopi yang tidak terpenuhi karena keterbatasan produksi dan kesulitan mengakses pasar. Faktor yang menyebabkan petani sulit mengakses pasar adalah masalah fisik dan informasi. Kawasan pedesaan umumnya memiliki infrastruktur yang buruk sehingga mempengaruhi mobilitas petani kopi. Model relasi kopi menyediakan bantuan kepada petani melalui organisasi petani dengan membangun fasilitas pengolahan sehingga kendala produksi bisa ditanggulangi. Selain itu, masalah informasi membuat petani kesulitan untuk menghasilkan kopi sesuai kriteria yang diinginkan oleh pasar. Melalui relasi kopi, informasi kebutuhan pasar tersebut diteruskan kepada petani sehingga mereka bisa memenuhi persyaratan kualitas dan atribut lainnya. Dengan demikian, model relasi kopi membuat petani memiliki kesempatan untuk tetap kompetitif dalam perdagangan kopi.

Kedua, membangun kemitraan strategis dengan mitra yang kompeten dalam pembangunan, terutama adalah pemerintah. Pemerintah sebagai agen pembangunan dalam relasi kopi akan menciptakan potensi pendapatan yang lebih menjanjikan. Petani kopi akan mendapatkan pelatihan agronomi, kemudahan akses terhadap input pertanian dan bantuan pembiayaan sehingga bisa mengakses pasar kopi premium.

Ketiga, meningkatkan transparansi dan pemerataan dalam rantai nilai kopi. Rantai nilai kopi menjadi lebih sederhana dimana setiap aktor yang tidak memberikan nilai tambah akan tereliminasi di dalamnya. Nilai tambah rata-rata yang diperoleh oleh petani berada diantara 10 sampai 23% dari nilai produk kopi akhir. Nilai tersebut lebih tinggi dari rata-rata yang diterima petani konvensional yang hanya berada pada 7 sampai 10% dari nilai produk kopi akhir. Oleh karena itu, relasi kopi dijadikan strategi pengentasan kemiskinan dan pembangunan kawasan pedesaan oleh pemerintah Rwanda.

Permasalahan yang menghambat intervensi metode relasi kopi umumnya

berhubungan dengan tidak optimalnya kinerja organisasi petani. Vicol dkk. (2018), menyatakan bahwa koperasi seringkali merupakan jaringan yang dikendalikan dan dikuasai oleh elite setempat. Dalam hal ini, koperasi sering menjadi sarana untuk mendapatkan bantuan pembiayaan, teknologi dan manfaat lainnya yang disediakan oleh pemerintah, lembaga swadaya, dan perusahaan roastery. Petani tidak diberikan kewenangan dalam menentukan kinerja dan arah kebijakan koperasi. Dengan demikian, sedikit sekali redistribusi pendapatan ataupun pembagian keuntungan bagi setiap petani yang terlibat di dalamnya. Hal tersebut diperkuat oleh Hernandez-Aguilera dkk. (2018), bahwa petani sering mengeluhkan buruknya komunikasi dengan pengurus koperasi dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan koperasi. Oleh karena itu, kepemilikan dan pengelolaan koperasi cenderung akan menentukan siapa yang lebih diuntungkan dari model relasi kopi tersebut.

Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengulas dampak dari pengembangan model relasi yang mulai berkembang pada beberapa perkebunan kopi rakyat di Indonesia. Objek penelitian adalah petani kopi Solok Radjo yang berada di Kabupaten Solok. Petani Kopi Solok Radjo telah terorganisir dalam bentuk koperasi dan mengadopsi skema pemasaran kopi sesuai dengan prinsip relasi kopi semenjak tahun 2014.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah kualitatif dengan melibatkan rumah tangga petani kopi Solok Radjo. Untuk mendapatkan informasi yang relevan maka dilakukan wawancara yang meliputi: produksi dan pemasaran kopi dan dimensi ekonomi terkait dengan pemasaran dan pengembangan kopi. Selain itu, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, dilakukan wawancara mendalam dengan pengelola koperasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kopi Solok Radjo merupakan salah satu kopi berstandar *specialty* yang berasal dari Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Kopi Solok Radjo mulai diinisiasi pada tahun 2011 melalui skema relasi langsung dengan petani kopi arabika yang ada di Kecamatan Lembah Gumanti dan Kecamatan Danau Kembar. Melalui skema tersebut, diberlakukan sistem garansi harga terhadap kopi gelondongan yang berkualitas. Pada sistem tersebut, harga kopi ditetapkan konstan pada level tertentu berdasarkan pertimbangan harga pasar biji kopi premium terhadap rasio konversi biji kopi dengan gelondongan (rendemen kopi) dan biaya operasional. Biasanya harga kopi gelondongan yang dibeli dari petani selalu berada di atas harga pasar. Sistem garansi harga memiliki beberapa tujuan. Pertama, menyediakan sistem harga yang berkeadilan sehingga memberikan dorongan terhadap petani kopi untuk menjadikan kopi sebagai bagian dari strategi penghidupan. Kedua, menghasilkan kopi berkualitas premium dengan karakteristik yang unik sebagai bagian dari kekayaan citarasa kopi nusantara. Ketiga, mewujudkan sistem pasar satu pintu terhadap kopi premium yang berasal dari Kabupaten Solok, sehingga kopi Solok Radjo memiliki daya tawar yang kuat.

Skema garansi harga pada satu sisi berhasil memperbaiki standar kualitas kopi, namun belum mampu mendorong perluasan lahan perkebunan kopi secara signifikan. Intensitas petani untuk menjadikan kopi sebagai strategi penghidupan belum berjalan sebagaimana mestinya. Beberapa alasannya adalah: (i) petani memang pada dasarnya sulit beradaptasi dengan perubahan, termasuk terhadap perubahan segmentasi permintaan kopi; (ii) petani yang umumnya membudidayakan hortikultura menganggap tidak cocok tumpang sari dengan kopi; dan, (iii) petani menganggap skema garansi harga hanya untuk beberapa saat saja sebagaimana kehadiran beberapa pengumpul dadakan yang

akhirnya memutuskan berhenti membeli kopi. Oleh karena itu, meskipun harga merupakan sistem insentif yang signifikan untuk menstimulasi perekonomian petani kopi (Arifin, 2010), namun ada aspek sosial dan kebiasaan yang menghalangi mereka untuk mendapatkan manfaatnya.

Koperasi Solok Radjo kemudian dibentuk pada tahun 2014 sebagai upaya untuk menggiatkan kopi kepada masyarakat. Harapannya para petani kopi akan terorganisir dengan keberadaan koperasi tersebut. Koperasi juga bertujuan sebagai sarana untuk mendapatkan bantuan pengembangan kopi dari pemerintah. Bantuan pemerintah tersebut meliputi penyediaan teknologi produksi pengolahan kopi, bibit kopi unggul, dan pelatihan budidaya yang dikelola oleh koperasi. Penguatan koperasi melalui bantuan pemerintah tersebut memberikan sinyal bahwa koperasi berkomitmen untuk memajukan perekonomian petani kopi. Hal itu membuat banyak petani mulai banyak menanam kopi. Selain itu, koperasi tetap mempertahankan sistem garansi harga terhadap pembelian gelondongan kopi.

Para petani kopi merasa semakin terorganisir dan terbantu secara ekonomi dengan keberadaan koperasi. Koperasi juga berperan sebagai sarana untuk mendapatkan bantuan pengembangan kopi dari pemerintah. Bantuan pemerintah tersebut meliputi penyediaan teknologi produksi pengolahan kopi, bibit kopi unggul, dan pelatihan budidaya yang dikelola oleh koperasi. Penguatan koperasi melalui bantuan tersebut memberikan sinyal bahwa koperasi berkomitmen untuk memajukan perekonomian petani kopi. Hal itu membuat banyak petani mulai menanam kopi. Selanjutnya, ada juga beberapa kondisi lain yang membuat masyarakat semakin berminat menanam kopi. Kondisi tersebut diantaranya: (i) harga tanaman hortikultura tidak membaik selama lebih kurang 8 bulan terakhir, terutama bawang merah; (ii) ketidakpastian cuaca dan cuaca ekstrem yang membuat produksi hortikultura turun drastis, dan (iii) stabilitas harga kopi tetap terjaga pada tingkat

yang konstan membuat para petani mulai mengalihkan strategi penghidupan mereka dengan membudidayakan kopi arabika. Koperasi berperan dalam menyediakan kebutuhan petani yang ingin menanam kopi tersebut dengan menyediakan bibit gratis. Selama tahun 2017 telah disalurkan sebanyak 20.000 batang bibit kopi bantuan pemerintah kepada petani kopi. Setiap petani bisa mendapatkannya setelah mengajukan bantuan kepada koperasi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh koperasi. Selanjutnya, pada tahun 2018 telah ada sekitar 30.000 batang bibit kopi yang siap untuk disalurkan kepada petani yang berminat untuk menanam kopi. Hasil panen kopi dibeli oleh koperasi berbentuk gelondongan matang. Kebijakan tersebut dianggap cukup ideal karena: (i) pembelian dalam bentuk gelondongan matang akan menghemat biaya produksi petani, mereka hanya perlu memastikan panen matang dan kemudian mendapatkan uang tunai hasil penjualan kepada koperasi; (ii) menjamin standar kualitas sesuai dengan permintaan pasar melalui satu prosedur pengolahan; dan, (iii) memungkinkan untuk menerapkan sistem pertanian kopi yang berkelanjutan. Harga gelondongan tersebut berada pada tingkat Rp.8000 per kg. Koperasi kemudian mengolah gelondongan tersebut sampai menjadi biji kopi dengan kadar air 11% yang siap dijual kepada *roastery*. Harga biji kopi tersebut ditentukan sesuai dengan proses pengolahan kopi yang dilakukan. Harga jual rata-rata biasanya pada tingkat Rp.85.000 per kg untuk proses *semi wash*, dan untuk proses *full wash* dan *natural* lebih tinggi lagi. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa sebagian besar nilai tambah didapatkan oleh koperasi namun pada kenyataannya tidak. Hasil produksi kopi masih relatif kecil (pada tahun 2017 hanya sebanyak 2,9 ton biji kopi), sehingga koperasi masih terbebani oleh biaya operasional.

Untuk memastikan konsistensi kualitas, Koperasi Solok Radjo mendirikan Unit Pengolahan Hasil pada sentra kopi strategis dan potensial, diantaranya UPH

Rawang Gadang (dekat kebun teh), dan UPH Air Sonsang. Pendirian UPH tersebut juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat dan mendapatkan peningkatan kapasitas dalam memproduksi kopi sesuai standar yang dibutuhkan pasar.

Selanjutnya, nilai tambah yang diperoleh oleh petani Koperasi Solok Radjo dalam skema relasi kopi adalah 16,47% (hasil penghitungan bisa dilihat pada lampiran 1). Nilai tersebut menunjukkan bahwa skema relasi kopi mampu memperbaiki distribusi pendapatan terhadap petani sebagaimana menurut Borrella et al. (2015). Selain itu, skema relasi kopi secara umum juga memperbaiki keterampilan petani kopi untuk menghasilkan kopi yang sesuai dengan permintaan pasar kopi berkualitas premium.

Hal yang perlu menjadi perhatian adalah, koperasi sejauh ini belum memiliki sikap yang jelas terkait peranannya sebagai organisasi bagi petani kopi. Meskipun cukup berhasil menggiatkan pengembangan kopi, koperasi belum mampu menawarkan keuntungan tambahan terhadap anggotanya. Partisipasi koperasi tidak satu pun mendapatkan bagi hasil dari penjualan gelondongan kopinya ke koperasi. Padahal, kekuatan koperasi sebenarnya berada pada partisipasi anggotanya. Oleh karena itu, perlu penguatan kapasitas organisasi disamping penguatan petani kopi untuk stabilitas produksi kopi Solok Radjo dalam jangka panjang.

SIMPULAN

Skema relasi kopi sangat ideal diimplementasikan untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas petani kopi sehingga bisa mengakses pasar kopi premium. Melalui model relasi kopi, petani mendapatkan bagian keuntungan yang lebih besar dan potensi penerimaan pendapatan dari proses pengembangan seperti peningkatan produktivitas kopi, dan lapangan pekerjaan di unit pengolahan kopi. Selain itu, petani kopi menjadi lebih

dinamis terhadap perubahan segmentasi permintaan sehingga bisa mengurangi risiko fluktuasi harga kopi. Untuk memaksimalkan intervensi model relasi kopi maka perlu pengelolaan koperasi dan kelompok tani secara transparan dengan melibatkan peran serta seluruh petani kopi. Agen pembangunan diharapkan juga dapat mengidentifikasi dengan cermat keberadaan organisasi petani sehingga bantuan pengembangan petani menjadi tepat sasaran. Selain itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memahami model relasi kopi pada perkebunan rakyat di Indonesia karena petani umumnya melakukan diversifikasi kopi dengan usaha pertanian lain. Dengan demikian bisa ditelusuri apakah model relasi kopi bisa memaksimalkan potensi pendapatan dari usaha pertanian lain tersebut ataupun sebaliknya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada Pusbindiklatren Bappenas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, B. (2010). Global Sustainability Regulation and Coffee Supply Chains in Lampung Province, Indonesia. *Asian Journal of Agriculture and Development*, 7(2), 67–89.
- Astuti, E. S., Offermans, A., Kemp, R., & Corvers, R. (2015). The Impact of Coffee Certification on the Economic Performance of Indonesian Actors. *Asian Journal of Agriculture and Development*, 12(2), 1–16.
- Borrella, I., Mataix, C., & Carrasco-Gallego, R. (2015). Smallholder Farmers in the Speciality Coffee Industry: Opportunities, Constraints and the Businesses that are Making it Possible. *IDS Bulletin*, 46(3), 29–44. <https://doi.org/10.1111/1759-5436.12142>
- Bray, J. G., & Neilson, J. (2017). Reviewing the impacts of coffee certification programmes on smallholder livelihoods. *International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services and Management*, 13(1), 216–232. <https://doi.org/10.1080/21513732.2017.1316520>
- Daviron, B., & Ponte, S. (2005a). *The coffee paradox: Global markets, commodity trade, and the elusive promise of development*. Zed Books Ltd.
- Daviron, B., & Ponte, S. (2005b). *The coffee paradox: Global markets, commodity trade, and the elusive promise of development*. London: Zed Books Ltd.
- Food and Agriculture Organization. (2019). FAOSTAT Data. Retrieved February 17, 2019, from <http://www.fao.org/faostat/en/#home>
- Glasbergen, P. (2018). Smallholders do not Eat Certificates. *Ecological Economics*, 147(February), 243–252. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2018.01.023>
- Glick, R. (2017). Happening Now - Coffee 4th Wave. Retrieved July 14, 2018, from Happening Now - Coffee's 4th Wave website: <https://www.senimancoffee.com/happening-now/>
- Hernandez-aguilera, J. N., Gómez, M. I., Rodewald, A. D., Rueda, X., Anunu, C., Bennett, R., & Es, H. M. Van. (2018). Quality as a Driver of Sustainable Agricultural Value Chains: The Case of the Relationship Coffee Model. *Business Strategy and the Environment*, 198, 179–198. <https://doi.org/10.1002/bse.2009>
- Holland, E., Kjeldsen, C., & Kerndrup, S. (2015). *Coordinating quality practices in Direct Trade coffee*. *0350(October)*, 0–11. <https://doi.org/10.1080/17530350.2015.1069205>

- Ibnu, M., Offermans, A., & Glasbergen, P. (2018). Certification and farmer organisation : Indonesian smallholder perceptions of benefits. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 54(3), 387–415. <https://doi.org/10.1080/00074918.2018.1506093>
- Kementerian Pertanian. (2017). *Outlook Kopi 2017*. Jakarta.
- Lewin, B., Giovannucci, D., & Varangis, P. (2004). Coffee Markets New Paradigms in Global Supply and Coffee Markets Supply and Demand. In *Agriculture and Rural Development Discussion Paper* (Vol. 3). Washington, DC.
- Mann, S. (2018). Agricultural System Models. In *Socioeconomics of Agriculture* (pp. 87–106). https://doi.org/10.1007/978-3-319-74141-3_5
- Milford, A. (2004). *Coffee, co-operatives and competition: the impact of Fair Trade*. Chr. Michelsen Institute.
- Neilson, J. (2007). Institutions, the governance of quality and on-farm value retention for Indonesian specialty coffee. *Singapore Journal of Tropical Geography*, 28(2), 188–204. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9493.2007.00290.x>
- Perez, J., Kilian, B., Pratt, L., Ardila, J. C., Lamb, H., Byers, L., & Sanders, D. (2017). Economic Sustainability-Price, Cost, and Value. In *The Craft and Science of Coffee* (pp. 133–160). <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-803520-7.00006-2>
- Ponte, S., & Gibbon, P. (2005). Quality standards, conventions and the governance of global value chains. *Economy and Society*, 34(1), 1–31. <https://doi.org/10.1080/0308514042000329315>
- Pratiwi, S. I. Y. (2015). *The Role of Farmer Cooperatives in the Development of Coffee Value Chain in East Nusa Tenggara Indonesia [Thesis]*. Humboldt University of Berlin.
- Rosenberg, L., Swilling, M., & Vermeulen, W. J. V. (2018). Practices of Third Wave Coffee: A Burundian Producer's Perspective. *Business Strategy and the Environment*, 27(2), 199–214. <https://doi.org/10.1002/bse.2010>
- Russell, B., Mohan, S., & Banerjee, A. (2012). Coffee market liberalisation and the implications for producers in Brazil, Guatemala and India. *World Bank Economic Review*, 26(3), 514–538. <https://doi.org/10.1093/wber/lhr055>
- Vicol, M., Neilson, J., Hartatri, D. F. S., & Cooper, P. (2018). Upgrading for whom? Relationship coffee, value chain interventions and rural development in Indonesia. *World Development*, 110, 26–37. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.05.020>
- Wahyudi, T., & Jati, M. (2012). Challenges of Sustainable Coffee Certification in Indonesia. *International Coffee Council 109th Session*, (September), 1–14. London: ICO.
- WIPO. (2017). Coffee: How Consumer Choices are Reshaping the Global Value Chain. In *Intangible Capital in Global Value Chains* (pp. 42–67). Geneva: World Intellectual Property Organization.

Lampiran 1. Nilai Tambah Aktor Kopi

| Kategori | Harga (per kg) | Faktor Konversi (FK) | Harga x FK | Selisih kategori | Nilai Tambah | Aktor |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|------------|---------------------|-----------------|-----------|
| harga cherry | 8000 | 7 | 56.000 | | 16,47% | petani |
| harga green bean | 95000 | 1 | 95.000 | 39000 | 11,47% | perantara |
| harga roasted bean | 425000 | 0,8 | 340.000 | 245000 | 72,06% | roastery |

Sumber: Koperasi Solok Radjo, Data diolah, 2018